



Kata Pengantar

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara Tahun 2019 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan.

Tujuan penyusunan laporan Kinerja adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi Kepala Daerah dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi menyempurnakan laporan dimaksud.

Demikian LKjIP Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 disusun sebagai bahan untuk menyusun LKjIP Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019.

Buranga, Februari 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN,



BAAZIRI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199702 1 019



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pertanahan yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran :**
1. Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional
 2. Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara

Indikatornya:

- ✓ Persentase Lahan Pemda Bersertifikat
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 23%
- ✓ Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 70%

Dari analisis terhadap sasaran Strategis, dengan 2 indikator Utama pada tahun 2019, kedua indikator yang ditetapkan yaitu Persentase Lahan Pemda Bersertifikat dan Persentase Penyelesaian kasus tanah negara belum memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja rata-rata 46,5% dan realisasi anggaran program utama 37,27% dengan efisiensi 62,73%. Efisiensi disebabkan oleh alokasi anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan masih kurang tepat dalam proses penyusunan anggaran di RKA serta pemilik lahan membatalkan kesepakatan harga yang telah dibuat oleh Tim Apraisal pada kegiatan pengadaan tanah. Sehingga Capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sangat rendah dan realisasi anggaran pada program utama masih kurang

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanahn kedepan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Kondisi Pegawai.....	2
D. Sarana Dan Prasarana.....	5
E. Keuangan.....	7
F. Sistematika	7
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	11
C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2019	11
D. Instrumen Pendukung	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	16
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	18
C. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	20
D. Realisasi Anggaran	21
BAB 4 PENUTUP	27
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Bagan Struktur Organisasi	
Matrix Renstra Tahun 2016-2021	
RKT 2019	
Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2019	



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan	2
Tabel 1.2 Pengisian formasi Jabatan Dinas Pertanahan	3
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan/pangkat	4
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.5 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5
Tabel 2.1 Visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan tujuan, sasaran Dinas Pertanahan...	9
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pertanahan 2016 - 2021	9
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan Tahun 2019	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	11
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara 2019	12
Tabel 2.6 Target Belanja per Sasaran Strategis	12
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Program yang secara langsung Utama dan Program Penunjang	12
Tabel 2.8 Anggaran Belanja Kegiatan Program Utama IKU dan Penunjang IKU Tahun 2019	13
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019	17
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	18
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017.....	19
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Periode Akhir Renstra.....	19
Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.....	20
Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis	21
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Program Utama dan Program Penunjang	21
Tabel 3.9 Analisis efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap capaian Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Program Utama IKU dan Penunjang IKU Tahun 2019	24



BAB. I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanahan
2. Mendorong Dinas Pertanahan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanahan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Struktur Organisasi

Pada Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dalam mengemban tugasnya dibantu :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian Sub bagian program, keuangan dan perlengkapan.
 - b. sub bagian Sub bagian umum dan kepegawaian.
2. Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan terdiri atas :
 - a. seksi Perizinan Pertanahan;



- b. seksi Penetapan Pertanahan;
- 3. Bidang Penanganan Sengketa Tanah, inventarisasi dan Pertanahan Pertanahan :
- 4. Kelompok Pejabat Fungsional

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara merupakan OPD yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi dinas

C. Kondisi Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara sebanyak 40 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS	17
2	KONTRAK/HONORER	25
JUMLAH		42



Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS 17 orang.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Pengisian Formasi jabatan dalam lingkup Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pengisian Formasi jabatan Dinas Pertanahan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
1.	Kepala Dinas	II.b	1	
2.	Sekretaris	III. a	1	
3.	Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan	III.b	1	
4.	Bidang Penanganan Sengketa Tanah, inventarisasi, dan perencanaan pertanahan	III.b	1	
5.	Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	IV.a	1	
6.	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	
7.	Seksi Perizinan Pertanahan	IV.a	1	
8.	Seksi Penetapan Pertanahan	IV.a	1	
9.	Seksi Penanganan Sengketa pertanahan	IV.a	1	
10.	Seksi Inventarisasi, Pengaturan, Penataan, Pengendalian Pemanfaatan dan Perencanaan Pertanahan	IV.a	1	
11.	Jabatan Fungsional Umum	-	7	
TOTAL			17	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Jabatan Eselon II.b sebanyak 1 (satu) telah terisi, Jumlah Jabatan Eselon III.a sebanyak 1 (satu) telah terisi, Jumlah Jabatan Eselon III.b sebanyak 2 (dua) telah terisi, Jabatan Eselon IV.a sebanyak 6 (enam) telah terisi dan jabatan fungsional umum sebanyak 7 orang.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 17 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pertanahan

Tabel. 1.3.
*Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan
berdasarkan Golongan/ Pangkat*

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	4
2	III	7
3	II	6
Jumlah		17

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Pegawai Golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, Jumlah pegawai golongan III sebanyak 7 (tujuh) orang, dan Jumlah pegawai golongan II sebanyak 6 (enam) orang.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 47 %, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel. 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata II (S2)	1
2	Strata-1 (S1)	8
3	Diploma	3
4	SLTA	5
Jumlah		17

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai di Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dengan klasifikasi S2, S1, Diploma dan Tamatan SLTA. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang cukup baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

D. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari segi jumlah perlengkapan dan pendukung lainnya di Dinas Pertanahan belum mencukupi, terutama menyangkut aspek kuantitasnya/jumlahnya perlu ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan jumlah pegawai dan pemeliharaan kearsipan, maka kondisi ini akan ditingkatkan.

Tabel 1.5. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4	1 Buah	Baik			
2	Kendaraan Roda 2	9 Buah	Baik			
3	Meja Biro	3 Buah	Baik			
4	Meja ½ Biro	18 Buah	Baik			
5	Kursi Futura	20 Buah	Baik			
6	Kursi Putar	3 Buah	Baik			
7	Kursi Gandeng	2 Buah	Baik			
8	Lemari Kayu 3 Badan	2 Buah	Baik			
9	Lemari Kayu 1 Badan	2 Buah	Baik			
10	Lemari Kayu Jati	2 Buah	Baik			
11	Leptop	6 Buah	Baik			
12	Genset	1 Buah	Baik			
13	Printer	7 Buah	Baik			
14	GPS	2 Buah	Baik			
15	AC	2 Buah	Baik			
16	Dispenser	1 Buah	Baik			
17	Kulkas	1 Buah	Baik			



18	Pompa Air	1 Buah	Baik			
19	Tandon Air	1 Buah	Baik			
20	Kipas angin	5 Buah	Baik			
21	Televisi	2 Buah	Baik			
22	Komputer PC	6 Buah	Baik			
23	Proyektor Attachment +	1 Buah	Baik			
24	Kamera Attachment +	2 Buah	Baik			
25	Sound sistem	1 Buah	Baik			
26	Wireless Access Point indoor	1 Buah	Baik			
27	Routerboard With Indoor Case + Instalasi	1 set	Baik			
28	Gorden	1 Set	Baik			
29	Radio Link High Speet + Instalasi	1 Set	Baik			
30	Tiang Antena	1 Buah	Baik			
31	Kabel Jaringan + Instalasi Pengkabelan	1 Set	Baik			
32	Mesin Ketik	1 Buah	Baik			
33	Kamera Drone	1 Buah	Baik			
34	Jam Dinding	3 Buah	Baik			
35	Papan Nama Kantor	1 Buah	Baik			
36	Struktur Organisasi	1 Buah	Baik			
37	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Buah	Baik			
38	Piring	1 Lusin	Baik			
39	Kompor	1 Buah	Baik			
40	Rice Cooker	1 Buah	Baik			
41	Jumbo Nasi	1 Buah	Baik			
42	Panci Besar	1 Buah	Baik			
43	Wajan Besar	1 Buah	Baik			
44	Tempat Aqua	1 Buah	Baik			
45	Cermin	1 Buah	Baik			

Sumber Data Dari Laporan Aset Dinas Pertanahan



E. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 3.989.589.700,- (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.238.909.700,- (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.750.680.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), dengan persentase belanja tidak langsung dari total anggaran sebesar 31% dan persentase belanja langsung dari total anggaran sebesar 69%.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN	Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dan Sistematika penulisan LKjIP.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.



BAB IV. PENUTUP	Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN	

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Visi RPJMD Kabupaten Buton Utara, yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera”. Misi RPJMD yang berhubungan dengan bidang pertanahan yaitu Misi ke-3 “Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*)”. Tujuan RPJMD Kabupaten Buton Utara yang berhubungan dengan misi ke-3 tersebut adalah “Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan Pemerintahan yang bersih (*good governance*)”, dengan sasaran “Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Pertanahan merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasan Dinas Pertanahan

Visi RPJMD	Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera		
Misi RPJMD	Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>good governance</i>)		
Tujuan RPJMD	Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>good governance</i>)	Tujuan OPD	Meningkatnya Pelayanan publik dibidang pertanahan
Sasaran RPJMD	Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Sasaran Strategis OPD	1. Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional 2. Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara



Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pertanahan 2016 - 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Renstra					Kondisi Akhir Periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	Persen	0	20	20	20	20	20	100
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	Persen	0	10	10	10	10	10	50



Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut.

1. Strategi :
 - Peningkatan Pelayanan dan tertib administrasi kepemilikan serta penguasaan tanah pemerintah daerah
 - Penyelesaian kasus tanah Negara;
2. Kebijakan :
 - Memperbaiki sistem pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan aplikasi
 - Mengoptimalkan penyelesaian kasus tanah negara
3. Program :
 - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan;
4. kegiatan :
 - Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - Perencanaan pengadaan tanah;
 - Persiapan pengadaan tanah
 - Pelaksanaan pengadaan tanah
 - Penyerahan hasil pengadaan tanah
 - Penetapan Pengukuran Batas Kawasan Wisata Alam
 - Penyelesaian konflik-konflik pertanahan



B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2019, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanahan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1.	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	%	100
2.	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100

C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun sasaran, indikator kinerja dan target yang ditetapkan Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	100%	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.494.819.000,-
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	10.375.000,-
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	167.724.000,-



Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 3.989.589.700,- (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.238.909.700,- (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.750.680.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), seperti pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.5
Target Belanja Dinas Pertanahan Kab. Buton Utara 2019

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.238.909.700,-	31%
Belanja Langsung	Rp. 2.750.680.000,-	69%
Jumlah	Rp.3.989.589.700,-	100%

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6
Target Belanja per Sasaran Strategis tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1.	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	1.505.194.000,-	54,7%
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	167.724.000,-	6,%
JUMLAH		1.672.918.000,-	60,7%

Akumulasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara yang dialokasikan untuk program utama dan program penunjang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Program Yang secara Langsung Utama dan Program Penunjang

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	Program Utama IKU :	1.672.918.000,-	60,7%
	- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.494.819.000,-	



	- Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan	167.724.000,-	
	- Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	10.375.000,-	
2	Program Penunjang IKU :	1.077.762.000,-	39,3%
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	697.404.000,-	
	- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	176.920.000,-	
	- Program Peningkatan Disiplin aparaturnya	82.920.000,-	
	- Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	52.000.000,-	
	- Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.148.000,-	
	- Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	63.370.000,-	
Jumlah Belanja Langsung		2.750.680.000,-	100 %

Tabel 2.8

Anggaran Belanja Kegiatan Program Utama IKU dan Penunjang IKU tahun 2019

Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
Program Utama IKU :		
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1.494.819.000,-
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	80 Buah	120.420.000
Perencanaan pengadaan tanah	1 Dokumen	40.834.000
Persiapan pengadaan tanah	1 Laporan	536.450.000
Pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen	701.350.000
Penyerahan hasil pengadaan tanah	10 Dokumen	61.815.000
Penetapan Pengukuran Batas Kawasan Wisata Alam	1 Laporan	20.900.000
Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	50 Orang	13.050.000
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		167.724.000,-
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	10 Laporan	167.724.000
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		10.375.000,-
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal		10.375.000,-



Program Penunjang :		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		697.404.000,-
Penyediaan jasa surat menyurat	1.500 Lembar	15.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	10.200.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	8.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	2 Jenis	17.640.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	37 Jenis	44.839.000
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	25.500 Lembar	6.150.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	4.800.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	2.800.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	7.200.000
Penyediaan makanan dan minuman	35 Orang	14.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	28 laporan	288.930.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	21 Laporan	18.950.000
Penyediaan Jasa Penunjang program dan kegiatan	16 Orang	210.565.000
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	5 Orang	47.830.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		176.920.000,-
Pengadaan Mobeleur	3 Jenis	80.840.000
Pengadaan Komputer	1 Unit	11.840.000
Pengadaan Alat-alat studio	2 Jenis	18.840.000
Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	1 Unit	23.400.000
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit	42.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		82.920.000,-
Pengadaan Mesin /Kartu Absensi	1 Unit	5.420.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	50 Stel	27.500.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50 Stel	50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		52.000.000,-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Orang	0,-
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan dan Perundang-undangan	5 Orang	52.000.000



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		5.148.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 Laporan	2.659.000
Penyusunan Lakip	1 Laporan	2.489.000
Program perencanaan organisasi perangkat daerah		63.370.000,-
Penyusunan Renja	1 Dokumen	2.379.000
Penyusunan RKA	1 Dokumen	2.379.000
Penyusunan DPPA	1 Dokumen	3.071.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	55.541.000
JUMLAH		2.750.680.000,-

D. Instrumen Pendukung

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara belum mengembangkan sistem informasi, sistem pengumpulan data atau inovasi lainnya yang dibangun sendiri untuk mendukung penerapan SAKIP.



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan/pelaksanaan/kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja organisasi

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

**Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010*

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA/KODE
1.	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	%	100	23	23	Rendah
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	70	70	Sedang

Dari tabel di atas, terdapat 2 indikator dengan 1 sasaran strategis. Pada tahun 2019, pada indikator pertama capaian realisasi pensertifikatan tanah aset Pemda hanya dapat diselesaikan 7 sertifikat atau 23% dari target yang ditetapkan untuk disertifikatkan yaitu 30 sertifikat. Sedangkan pada indikator kedua capaian realisasi penyelesaian kasus tanah Pemda hanya dapat diselesaikan 7 kasus atau 70% dari target yang ditetapkan yaitu 10 Kasus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi target capaian dari kedua indikator tersebut masih **Sangat Rendah** dengan rata-rata capaian 46,5%



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

B.1 Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g=(f/e)*100$
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	Dok.	30	7	23
		Formulasi realisasi $\frac{\text{jumlah lahan bersertifikat (n)}}{\text{jumlah target lahan pemda (x)}} \times 100$	Realisasi N = 7 X = 30	Hasil : $\frac{7}{30} \times 100 = 23$		
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	Lap.	10	7	70
		Formulasi realisasi $\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan (n)}}{\text{jumlah kasus yang terdaftar (x)}} \times 100$	Realisasi N = 7 X = 10	Hasil : $\frac{7}{10} \times 100 = 70$		

Dari table di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 target renstra dalam pesertifikatan tanah aset Pemerintah Daerah Kab. Buton Utara adalah 20% atau 30 Dokumen dari jumlah lahan Pemda Buton Utara yang akan disertifikatkan sampai pada tahun 2021 yaitu 150 bidang/lahan. Dari target 30 bidang/lahan yang disertifikatkan hanya terlaksana 7 bidang/lahan atau 23%. sedangkan pada penyelesaian kasus tanah Negara capaian realisasi yang diperoleh adalah 70% atau hanya 7 kasus yang dapat diselesaikan.

B.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini

Tabel 3.4*Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
				2017	2018	2019
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	%	86	53	23
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	70

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2017 mengalami penurunan. Penyebabnya adalah anggaran yang diporsikan untuk kegiatan ini berkurang bila dibandingkan dengan tahun lalu.

B.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra**Tabel 3.5***Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi Th. 2019 (%)	Tingkat Kemajuan s.d 2021 (%)
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	100	23	4,66%
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	50	70	14%

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa IKU (Persentase Lahan Pemda Bersertifikat) dengan realisasi capaian kinerja 23% dari target IKU 2019, ini berarti bahwa dari target Renstra Tahunannya (20%) hanya dapat tercapai sebesar 4,66%. Sedangkan pada IKU (Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara) dengan realisasi capaian kinerja 70%



dari target IKU 2019, ini juga berarti bahwa dari target Renstra pertahunnya (10%) dapat terlaksana dengan baik/berhasil. sehingga dapat disimpulkan bahwa Pencapaian target Renstra pada indicator pertama sampai dengan tahun 2021 mengalami kemajuan sebesar 4,66% dan Pencapaian target Renstra pada Indikator kedua sampai pada tahun 2021 juga mengalami kemajuan sebesar 14%.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

NO	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	100	23	23	1. Kegiatan Pensertifikatan tanah berjalan dengan baik dan lancar 2. Realisasi belanja lebih efisien dari anggaran yang ditetapkan	1. Masih kurangnya anggaran yang diporsikan untuk pensertifikatan tanah aset pemerintah 2. Surat Ket. Hibah ttg lahan yang dikuasai pemda ada yang hilang atau kurang jelas hibahnya.	Melakukan koordinasi intensif dengan BPN untuk mengetahui kekurangan kelengkapan berkas sehingga dapat dipenuhi dan ditindak lanjuti sampai terbit sertifikat
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	100	70	70	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan berjalan dengan baik dan lancar walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi		Melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik-konflik pertanahan

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa pengamanan/pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah mengalami keberhasilan walaupun tidak semua dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pemberkasan untuk pensertifikatan tanah serta pagu anggaran yang masih kurang.

Strategi yang dilaksanakan untuk capaian kinerja tersebut dilakukan dengan Program :

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan;

D. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	1.505.194.000,-	457.962.000,-	30,42
2.	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	167.724.000,-	165.554.500,-	98,70
JUMLAH		1.672.918.000	623.516.500	37,27

Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional adalah 37,27%. Ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang harus dibatalkan pelaksanaannya, seperti pada kegiatan pengadaan tanah yang tidak berlanjut prosesnya karena pemilik lahan membatalkan kesepakatan jual beli tanah padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan. Sehingga hal ini dapat berpengaruh pada kurangnya realisasi anggaran yang cukup besar.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja program dan program penunjang

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Utama :	1.672.918.000	623.516.500	37,27
	• Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.494.819.000,-	447.607.000,-	29,94
	• Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan	167.724.000,-	165.554.500,-	98,70
	• Program pengembangan sistem informasi pertanahan	10.375.000,-	10.355.000,-	99,8
2	Program Penunjang :	1.077.762.000,-	1.067.246.500,-	99
	• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	697.404.000,-	688.676.900,-	98,74
	• Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	176.920.000,-	176.840.000,-	99,95
	• Program Peningkatan Disiplin	82.920.000,-	82.420.000,-	99,39



	aparatur			
	• Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	52.000.000,-	51.194.100,-	98,45
	• Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja	5.148.000,-	5.148.000	100
	• Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	63.370.000,-	62.967.500,-	99,36
	Jumlah Belanja Langsung	2.750.680.000,-	1.690.763.000	61,46

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 61,46% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 37,27%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99%.



Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA				PROGRAM	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria / Kode		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	100	23	23	Sangat Rendah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.494.819.000,-	447.607.000,-	29,94	62,73
							Program pengembangan sistem informasi pertanahan	10.375.000,-	10.355.000,-	99,8	
2.	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	100	70	70	Sedang	Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan	167.724.000,-	165.554.500,-	98,70	
Rata-Rata Tingkat Capaian					46,5			1.672.918.000	623.516.500	37,27	



Secara realisasi fisik seluruh kegiatan dapat terselesaikan atau dapat tercapai 46,5%. Realisasi keuangan tidak seluruh kegiatan dapat tercapai 37,27% karena adanya efisiensi. Efisiensi disebabkan oleh alokasi anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan masih kurang tepat dalam proses penyusunan anggaran di RKA serta pemilik lahan membatalkan kesepakatan harga yang telah buat Tim Apraisal pada kegiatan pengadaan tanah dan adanya tambahan biaya pengukuran yang diminta oleh pihak dari BPN pada kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda.

Realisasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Program Utama IKU dan Penunjang IKU Tahun 2019

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Utama IKU :	1.672.918.000	623.516.500	37,27
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.494.819.000,-	447.607.000,-	29,94
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	120.420.000,-	118.772.000,-	
Perencanaan pengadaan tanah	40.834.000	36.030.000	
Persiapan pengadaan tanah	536.450.000	16.450.000	
Pelaksanaan pengadaan tanah	701.350.000	232.400.000	
Penyerahan hasil pengadaan tanah	61.815.000	11.765.000	
Penetapan Pengukuran Batas Kawasan Wisata Alam	20.900.000	20.140.000	
Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	13.050.000	12.050.000	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	167.724.000	165.554.500	98,70
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	18.520.000	18.509.400	
Pengawasan Pemanfaatn Tanah	25.410.000	25.404.100	
Penyelesaian masalah ganti rugi lahan/tanaman tumbuh	90.181.000	89.623.000	
Penyuluhan hukum pertanahan	24.738.000	23.178.000	
Inventarisasi dan pemetaan tanah kosong	8.875.000	8.840.000	
Program pengembangan sistem informasi pertanahan	10.375.000	10.355.000	99,8
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	10.375.000	10.355.000	



Program Penunjang	1.077.762.000,-	1.067.246.500,-	99
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	697.404.000,-	688.676.900,-	98,74
Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	15.000.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	10.200.000	4.140.000	40,58
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000	6.500.000	81,25
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.640.000	17.639.900	99,99
Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.839.000	44.839.000	100
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6.150.000	6.027.000	98
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.800.000	4.800.000	100
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	2.800.000	2.000.000	71,42
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000	7.141.000	99,18
Penyediaan makanan dan minuman	14.500.000	14.500.000	100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	288.930.000	288.690.000	99,91
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	18.950.000	18.770.000	99,05
Penyediaan Jasa Penunjang program dan kegiatan	210.565.000	210.000.000	99,73
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi keuangan	47.830.000	47.830.000	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176.920.000,-	176.840.000,-	99,95
Pengadaan Mobeleur	80.840.000	80.760.000	99,9
Pengadaan Komputer/Leptop	11.840.000	11.840.000	100
Pengadaan Alat-alat studio	18.840.000	18.840.000	100
Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	23.400.000	23.400.000	100
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.000.000	42.000.000	100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	82.920.000,-	82.420.000,-	99,39
Pengadaan kartu absensi	5.420.000	5.420.000	100
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.500.000	27.500.000	100
Pengadaan pakaian kerja lapangan	50.000.000	49.500.000	99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.000.000,-	51.194.100,-	98,45
Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	-
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	52.000.000	51.194.100	98,45



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.148.000,-	5.148.000	100
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.659.000	2.659.000	100
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2.489.000	2.489.000	100
Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	63.370.000,-	62.967.500,-	99,36
Penyusunan Rencan Kerja (RENJA)	2.379.000	2.379.000	100
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	2.379.000	2.379.000	100
Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	3.071.000	2.958.000	96,32
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	55.541.000	55.251.500	99,47
Jumlah Belanja Langsung	2.750.680.000,-	1.690.763.000	61,46

BAB. IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanahan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun kedua dari Rencana strategis Tahun 2016-2021. Secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 pada Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 realisasi target capaian dari kedua indikator tersebut masih **Sangat Rendah** (≤ 50), hal ini ditunjukkan dengan rata rata pencapaian indikator sasaran sebesar 46,5% terhadap target yang ditetapkan. Penyebabnya adalah pemilik lahan membatalkan kesepakatan harga yang telah dibuat oleh Tim Apraisal pada kegiatan pengadaan tanah. Olehnya itu, kerja sama dan partisipasi semua pihak sangat diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait sasaran strategis dapat dirumuskan dengan saran-saran/rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan BPN untuk mengetahui kekurangan kelengkapan berkas sehingga dapat dipenuhi dan ditindak lanjuti sampai terbit sertifikat.
2. Meningkatkan porsi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pensertifikatan tanah.
3. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan dana/anggaran disediakan harus lebih tepat lagi.
4. Melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik-konflik pertanahan.

Dalam menghadapi problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Pertanahan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terhadap penyelesaian penyediaan lahan dilaksanakan pendekatan dengan para pemilik tanah dengan bantuan pemerintah kabupaten secara hirarkis (Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tokoh-tokoh Masyarakat.
2. Peningkatan intensitas komunikasi efektif terhadap semua stake holder dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan kualitas suberdya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya.



4. Menjalini dan membina hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Buranga, Februari 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN,



BAAZIRI, S.Pd., M.Si

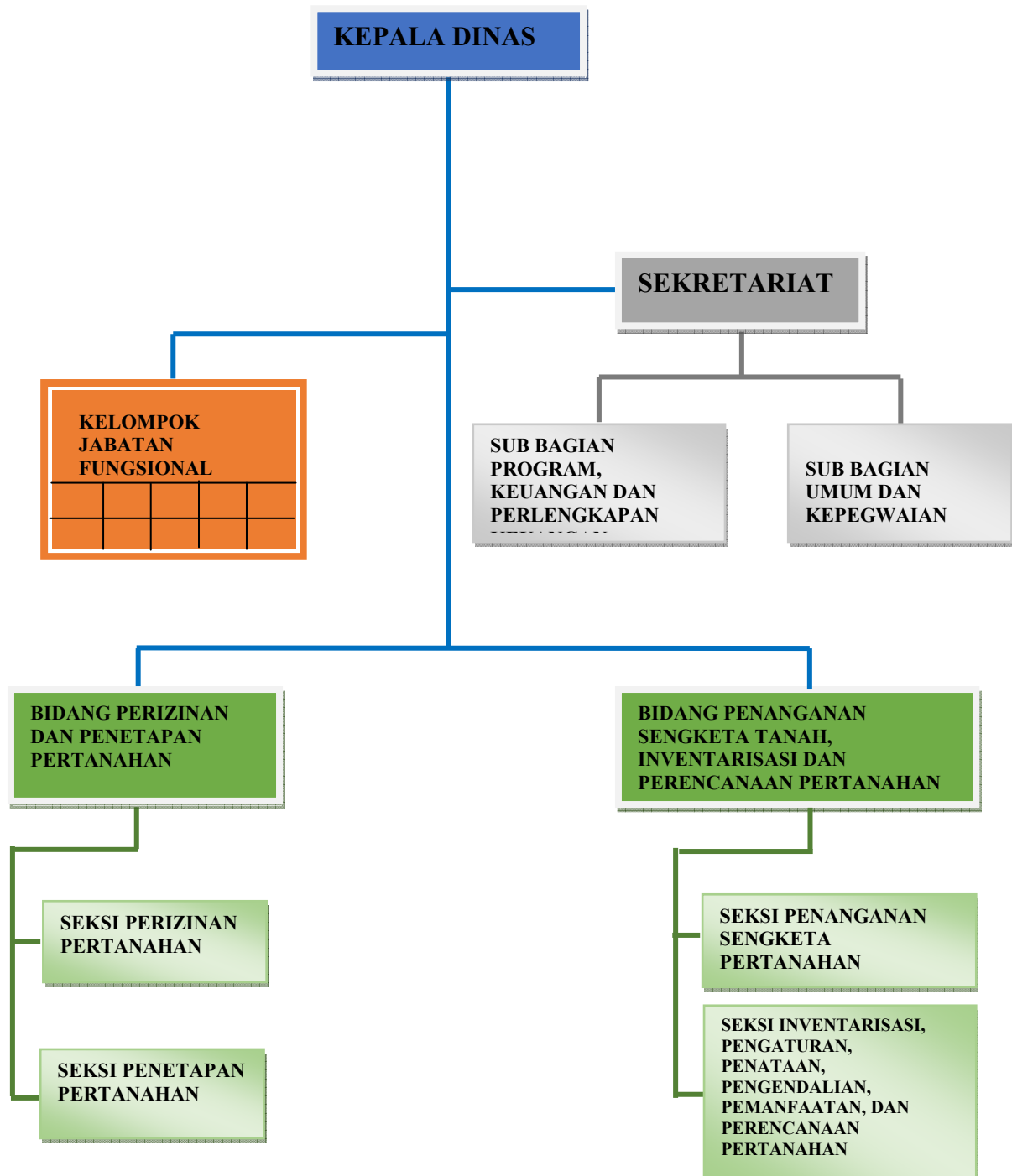
Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691231 199702 1 019



LAMPIRAN 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BUTON UTARA**



LAMPIRAN 2

**DINAS : PERTANAHAN
KAB/KOTA : KABUPATEN BUTON UTARA**

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA					KONDISI AKHIR	PROGRAM
					2017	2018	2019	2020	2021		
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.											
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase lahan Pemda bersertifikat	%	0	20	20	20	20	20	100	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
											Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	%	0	10	10	10	10	10	50	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan



Lampiran 3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Kode Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	20	2.04.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat tahun (i)	100%	1.693.654.000
				1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Buah	40 Buah	120.420.000
				3 Perencanaan pengadaan tanah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	73.444.000
				4 Persiapan pengadaan tanah	Jumlah Laporan	1 Laporan	705.850.000
				5 Pelaksanaan pengadaan tanah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	692.425.000
				6 Penyerahan hasil pengadaan tanah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	61.815.000
				8 Penetapan Pengukuran Batas Kawasan Wisata Alam	Jumlah Laporan	1 Laporan	20.900.000
				10 Sosialisasi penyelenggaraan pengadaan tanah Untuk Kepentingan Pembangunan	Jumlah Orang	50 Orang	18.800.000
			2.04.01.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase informasi yang di ekspos	50%	13.425.000
			1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah Laporan	3 Laporan	13.425.000
Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	10	2.04.01.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara tahun (i)	100%	128.055.000
				1 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Laporan	10 Laporan	21.170.000
				2 Pengawasan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.410.000
				3 Penyelesaian masalah ganti rugi lahan/tanaman tumbuh	Jumlah Laporan	1 Laporan	40.662.000
				4 Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah orang	136 Orang	28.888.000



	5	Inventarisasi dan pemetaan tanah kosong	Jumlah Laporan	3 Laporan	11.925.000
2.04.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tertib Penatausahaan persuratan	100%	539.814.000
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Lembar	1000 Lembar	10.000.000
	2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	2 Jenis	12.000.000
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	10 Unit	19.000.000
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jenis	2 Jenis	2.500.000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	38 Jenis	44.979.000
	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Lembar	312 Lembar	12.150.000
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis	2 Jenis	800.000
	14	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Jenis	2 Jenis	3.800.000
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis	1 Jenis	7.200.000
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang	200 Orang	5.000.000
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah Laporan	38 Laporan	187.180.000
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Jumlah Laporan	9 Laporan	8.550.000
	20	Penyediaan Jasa Penunjang program dan kegiatan	Jumlah Orang	22 Orang	194.065.000
	21	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jumlah Orang	5 Orang	32.590.000
2.04.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% laporan aset yang baik	100%	152.720.000
	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis	3 Jenis	78.840.000
	11	Pengadaan Komputer/Leptop	Jumlah Unit	1 Unit	11.840.000
	12	Pengadaan Alat-alat studio	Jumlah Jenis	2 Jenis	15.840.000
	22	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah Unit	1 Unit	13.800.000
	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit	10 Unit	32.400.000
2.04.01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% ASN yang datang dan pulang tepat waktu	100%	87.920.000



	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Unit	1 Unit	10.420.000
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel	50 Stel	27.500.000
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Stel	50 Stel	50.000.000
2.04.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN yang mengikuti diklat, bimtek	100%	85.040.000
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Orang	1 Orang	17.040.000
	3	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang	4 Orang	68.000.000
2.04.01.06		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% Laporan Keuangan dan capaian kinerja Yang selesai tepat waktu	100%	4.282.000
	1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.226.000
	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.056.000
2.04.01.07		Program Perencanaan Organisasi perangkat daerah	Persentase laporan yang tepat waktu	100%	45.770.000
	1	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.946.000
	3	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.038.000
	4	Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.245.000
	5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	38.541.000
JUMLAH					2.750.680.000



**LKjIP DINAS PERTANAHAN KAB BUTON UTARA
TAHUN 2019**

Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	10%	30%	30	30%	Program penyelesaian konflik konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara tahun (i)																											
						- Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Laporan	10	Melakukan Mediasi dan musyawarah terhadap pihak yang bersengketa																									
						- Pengawasan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Dokumen	1	Melakukan Pengawasan pemanfaatan tanah																									
						- Penyelesaian masalah ganti rugi lahan/tanaman tumbuh	Jumlah Laporan	-	1	-	-	Melakukan Penyelesaian masalah ganti rugi lahan/tanaman tumbuh																						
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA				RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN																					
		TR 1	TR2	TR3	TR4			TR 1	TR2	TR3	TR4		TR1			TR2			TR3			TR4												
		1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12																		
1	2	3				4	5	6				7	9																					
						- Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah orang	-	136	-	-	Melaksanakan Penyuluhan hukum pertanahan																						
						- Inventarisasi dan pemetaan tanah kosong	Jumlah Laporan	3				Melakukan Inventarisasi dan pemetaan tanah kosong																						



Lampiran 5

Dinas : DINAS PERTANAHAN
Kab/Kota : BUTON UTARA

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Kode	Program	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat tahun 2018	100	23	23	sangat Rendah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.494.819.000	447.607.000	29,94
							Program pengembangan sistem informasi pertanahan	10.375.000	10.355.000	99,81
2	Meningkatnya Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara tahun 2018	100	70	70	sedang	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	167.724.000	165.554.500	98,71